

BAB VIII

KESIMPULAN DAN SARAN

8.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terhadap penyelenggaraan SIK di puskesmas-puskesmas di wilayah kerja Suku Dinas Kesehatan Masyarakat Jakarta Timur tahun 2007, maka dapat diambil kesimpulan secara umum, Pegawai/Petugas SIK di puskesmas-puskesmas di wilayah kerja Suku Dinas Kesehatan Masyarakat Jakarta Timur pada tahun 2007 telah sesuai dengan keputusan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi DKI Jakarta Nomor : 7719/2004 tanggal 23 Juli 2004, dan Kepmen PAN no. 66 Tahun 2003 pasal 1. Namun, kinerja para petugas SIK tersebut belum maksimal mengingat belum semua petugas SIK di puskesmas-puskesmas di wilayah kerja Suku Dinas Kesehatan Masyarakat Jakarta Timur mendapatkan pelatihan mengenai pengoperasian program SIK, pengalaman kerja di bidang SIK yang masih kurang, dan juga beban tugas yang diemban yang melebihi kapasitas pegawai SIK Integrasi tersebut.

Peralatan yang digunakan dalam penyelenggaraan SIK Integrasi di puskesmas-puskesmas di wilayah kerja Suku Dinas Kesehatan Masyarakat Jakarta Timur tahun 2007 sudah sesuai dengan SK Kepala Dinas Nomor 6661/2004, dan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi DKI Jakarta Nomor : 7719/2004 tanggal 23 Juli 2004. Namun, masih banyak sekali masalah yang berasal dari perakatan SIK yang dapat mengganggu kegiatan SIK. Masalah-masalah tersebut antara lain: Komputer SIK yang terkena Virus karena pakai untuk berbagai macam kegiatan Puskesmas, Jaringan telepon untuk Internet yang diblokir, server yang rusak, dan juga software SIK yang bermasalah.

Metode yang digunakan dalam penyelenggaraan SIK Integrasi di puskesmas-puskesmas di wilayah kerja Suku Dinas Kesehatan Masyarakat Jakarta Timur tahun 2007 telah sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi DKI Jakarta Nomor : 7719/2004 tanggal 23 Juli 2004.

Anggaran yang digunakan untuk mengadakan kegiatan SIK Integrasi di puskesmas-puskesmas di wilayah kerja Suku Dinas Kesehatan Masyarakat Jakarta Timur tahun 2007 telah sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi DKI Jakarta Nomor : 7719/2004 tanggal 23 Juli 2004, dan Modul Pembangunan SIK Propinsi DKI Jakarta 2002-2012, karena anggaran yang ada saat ini pada puskesmas-puskesmas yang menggunakan software yang berasal dari Dinas Kesehatan Propinsi DKI Jakarta dan puskesmas-puskesmas yang menggunakan software dari KPTI telah menggunakan anggaran yang berasal dari pemerintah karena KPTI itu sendiri adalah instansi pemerintah sehingga seluruh anggarannya berasal dari APBD. Namun jumlah anggaran untuk kegiatan SIK Integrasi sampai saat ini masih dirasakan kurang, terutama anggaran yang berasal dari Dinas Kesehatan Propinsi DKI Jakarta.

Distribusi Hasil Input SIK Integrasi pada puskesmas-puskesmas di wilayah kerja Suku Dinas Kesehatan Masyarakat Jakarta Timur tahun 2007 dapat dikatakan belum berjalan dengan seharusnya. Hal tersebut dikarenakan distribusi hasil Input SIK via internet tidak sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi DKI Jakarta Nomor : 7719/2004 tanggal 23 Juli 2004, karena dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa seharusnya Tim SIK Integrasi mengirim data SIK Integrasi setiap hari kerja pukul 15.00, menggunakan internet yang telah disetting secara otomatis dalam software. Namun yang terjadi di lapangan adalah puskesmas-puskesmas tersebut tidak dapat mengirimkan data SIK Integrasi setiap hari kerja pukul 15.00, menggunakan internet yang telah disetting secara otomatis dalam software yang dikarenakan perbedaan software, tidak ada jaringan telepon untuk internet, gangguan peralatan, dan juga gangguan pada website Dinkes DKI Jakarta itu sendiri.

Berdasarkan penjabaran tersebut secara garis besar dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan SIK Integrasi di Puskesmas-puskesmas di Wilayah Kerja Suku Dinas Kesehatan Masyarakat Jakarta Timur tahun 2007 belum berjalan dengan optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya kendala yang terjadi di lapangan berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan SIK integrasi yang

menghambat jalannya pelaksanaan SIK Integrasi di puskesmas-puskesmas tersebut.

8.1 SARAN

8.2.1 Bagi Puskesmas-puskesmas di Wilayah Kerja Suku Dinas Kesehatan Masyarakat Jakarta Timur.

1. Puskesmas diharapkan dapat meningkatkan kemandirian dalam hal menangani masalah yang berkaitan dengan kegiatan SIK dengan memberdayakan sumber daya yang telah tersedia.
2. Bagi puskesmas-puskesmas kecamatan diharapkan agar dapat memberikan pembinaan SIK Integrasi secara berkesinambungan terhadap puskesmas kelurahan.
3. Puskesmas diharapkan mempunyai anggaran yang dialokasikan secara khusus bagi penyelenggaraan SIK Integrasi.
4. Puskesmas-puskesmas yang masih belum melaksanakan SIK Integrasi secara optimal diharapkan dapat melakukan studi banding atau pun tukar pikiran kepada puskesmas yang sudah dapat melaksanakan SIK dengan optimal.

8.2.2 Bagi Suku Dinas Kesehatan Masyarakat Kotamadya Jakarta Timur

1. Diharapkan agar dapat menambah frekuensi pembinaan SIK Integrasi bagi Puskesmas Kecamatan dan Kelurahan.
2. Diharapkan agar dapat lebih sering mengadakan kunjungan lapangan dalam hal mengobservasi keadaan SIK yang sebenarnya di puskesmas.

8.2.3 Bagi Dinas Kesehatan Propinsi DKI Jakarta

1. Dinas Kesehatan diharapkan terus memberikan sosialisasi kepada Kepala Puskesmas tentang manfaat program SIK Integrasi Puskesmas dan Output yang diharapkan. Dengan demikian diharapkan Kepala Puskesmas memberikan dukungan positif atas pelaksanaan program SIK Integrasi Puskesmas.

2. Dinas Kesehatan melalui Sudin Kesmas mendata petugas SIK Integrasi Puskesmas yang telah ada berikut kompetensi, pelatihan yang telah diikuti, dan sarana prasarana yang telah dimiliki oleh Puskesmas, kemudian membuat peta kebutuhan SDM dan sarana prasarana masing-masing untuk melaksanakan SIK Integrasi sebagai acuan. Dengan melihat peta kebutuhan, dilaksanakan pelatihan bagi petugas dengan materi program SIK Integrasi dan pengantar komputer dan bagi Kepala Puskesmas dengan materi pemakaian informasi, intrepetasi dan analisisnya.
3. Dinas kesehatan membuat kebijakan operasional penganggaran program SIK Integrasi Puskesmas dan mengkoordinasikannya dengan Sudin Kesmas dan Puskesmas agar seluruh kebutuhan anggaran untuk penyelenggaraan SIK integrasi Puskesmas dapat terpenuhi.
4. Pengembangan software SIK yang berkesinambungan agar hasil keluaran SIK Integrasi sesuai dengan kebutuhan Puskesmas.
5. Dinas kesehatan Diharapkan juga memberikan pembekalan yang lebih mendalam kepada para Petugas SIK di lapangan, termasuk pendampingan selama masa awal menggunakan software SIK.
6. Dinas Kesehatan diharapkan dapat menambah jumlah petugas yang menangani masalah SIK. Dengan hal tersebut diharapkan kedepannya apabila terjadi masalah terhadap kegiatan SIK di puskesmas, respon yang diberikan dapat lebih cepat.

8.2.4 Bagi KPTI

1. Diharapkan dapat bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Propinsi DKI Jakarta dalam penyelenggaraan SIK Integrasi, terlebih lagi dalam pembuatan software SIK. Sehingga nantinya terdapat keseragaman software yang ada di Puskesmas baik di tingkat kecamatan ataupun di kelurahan.
2. Diharapkan dapat memfasilitasi penyelenggaraan SIK Integrasi tidak hanya Pada Puskesmas kecamatan, tetapi juga pada puskesmas kelurahan.